

EDITORIAL

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

Oleh : Saniatul Lativa

Pandemi Covid-19 merupakan krisis di sektor kesehatan yang memberi efek domino pada sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di berbagai daerah untuk menekan kasus penyebaran Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2020 merupakan yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Secara total, ekonomi Indonesia selama tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar -2,07 persen. Pelemahan perekonomian ini berdampak pada setiap pelaku ekonomi dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga sektor keuangan. Berbagai kegiatan ekonomi juga tersendat seperti terhambatnya investasi, terkontraksinya ekspor impor yang mempengaruhi rantai pasokan, dan menurunnya konsumsi masyarakat.

Lesunya kinerja perekonomian makro Indonesia sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat berimbas pada menurunnya aktivitas operasional para pelaku usaha yang berujung pada keputusan untuk mengurangi jam kerja pegawai hingga jumlah pegawai yang bekerja. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat cukup tajam di tahun 2020 yakni bertambah 2,67 juta pekerja (Sakernas Agustus 2020) sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19 tercatat sebesar 29,12 juta pekerja. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga tercatat mengalami peningkatan sebanyak 1,63 juta orang di Maret 2020 dan 1,13 juta orang di September 2020 (bps.go.id).

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada merosotnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dalam memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Di satu sisi, upaya menurunkan kurva penyebaran virus akan menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat yang efeknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, pelonggaran mobilitas masyarakat mampu mempercepat pemulihan ekonomi namun dapat mengekskalasi penyebaran virus yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya formulasi kebijakan pemerintah yang tidak hanya mampu mengatasi krisis kesehatan tetapi juga meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan. Upaya pengendalian penyebaran Covid-19 harus memperhitungkan biaya ekonomi yang ditimbulkan dan juga sebaliknya kerangka pemulihan ekonomi juga harus tetap dilaksanakan dalam kondisi pandemi yang terkendali.

Melihat permasalahan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai strategi dilancarkan oleh pemerintah demi menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal menjadi wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal juga sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, hingga inventasi nasional Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020). Setelah memengaruhi bidang kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia.

Kebijakan stimulus fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, stimulus fiskal juga menjadi penting sebagai kebijakan *counter cyclical* untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang

mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan stimulus fiskal pada dua kondisi tersebut didasari oleh kemampuan instrumen stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah dalam memengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan output perekonomian, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional (Ismail, 2018). Tambunan (2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berupa insentif pajak, masih perlu pengujian agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid. Melalui penelitian ini, penulis mencoba berkontribusi dengan menganalisis kebijakan fiskal di masa pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi terbaru mengenai masalah terkait.